



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 812/IV/2014

IV/APRIL 2014



Komisi X Pantau UN di Berbagai Daerah

Komisi X Pantau UN di Berbagai Daerah



Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri sedang mengecek soal-soal Ujian Nasional yang masih disegel.

Secara umum persiapan dan pelaksanaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2014 di berbagai daerah berjalan lancar sesuai standar. Pantauan sejumlah anggota DPR yang membidangi pendidikan ke Makassar, Sulawesi Selatan, Semarang, Jawa Tengah dan Kota Batam Kepulauan Riau berjalan baik sesuai harapan masyarakat dan harapan Komisi X DPR.

“Secara umum pelaksanaan UN 2014 di Makassar berjalan baik, mudah-mudahan seterusnya nanti sampai ada pengumuman kelulusan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Itu harapan kami,” kata Wakil Ketua Komisi X, Syamsul Bachri di sela-sela kunjungan lapangan Komisi X ke beberapa SMA/SMK/MAN terkait pelaksana-

naan UN tingkat SMA dan sederajat di Makassar, Sulsel, Senin (14/4).

Kondisi yang baik ini, tegas Syamsul, harus dipertahankan bahkan kualitasnya harus terus ditingkatkan. Walaupun tadi ada laporan terjadi tertukarnya soal, namun menurutnya itu persoalan teknis dan masih bisa diatasi oleh panitia di Makassar.

“Tadi saat meninjau ke semua kelas dari sekolah yang dikunjungi, saya tanya pada pengawas dan guru, secara umum mereka mengatakan berjalan baik, tidak ada yang kurang, jadwal yang ditentukan sesuai *schedule*, dan soal yang diterima tingkat kerahasiaannya terjamin, tidak ada yang bocor,” paparnya.

Sekolah pertama yang dikunjungi Tim Komisi X adalah sekolah unggulan SMA Negeri 17 Makassar. Di sekolah unggulan Sulsel tersebut, Syamsul dan rombongan melihat siswa di beberapa kelas, termasuk memantau persediaan soal dan lembar jawaban di sekretariat sekolah tersebut.

Menurut Syamsul, pelaksanaan UN secara umum di sekolah yang pertama Komisi X DPR pantau di Makassar, berjalan tertib dan lancar.

Setelah melakukan peninjauan ke sekolah unggulan tersebut, rombongan Tim Komisi X meninjau SMK 5 dan MAN 2 Model, Makassar untuk bergabung dengan rombongan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan



Kapolda Sulselbar Irjen Pol Baharuddin Andi.

Menurut Syamsul, itu kesan awal Komisi X memantau pelaksanaan UN 2014 di SMA 17, SMK 5 dan MAN 2 Mo-

del di Makassar. Karena dirinya belum mendapatkan informasi pelaksanaan UN di daerah lain.

Pelaksanaan UN 2014 tingkat SMA dan sederajat di Makassar diikuti 21.962

pelajar dari SMA, SMK, MAN, paket B dan paket C, melibatkan 220 orang personil dari Kepolisian dan 1.110 orang pengawas yang terdiri dari guru sekolah, staf Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi. (sc), foto : suci, sugeng/parle/hr.

UN Bukan Satu-satunya Penentu Kelulusan



Siswa siswi SMA 17 Makasar serius mengerjakan soal-soal Ujian Nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menyatakan Ujian Nasional (UN) bukan satu-satunya penentu untuk kelulusan seorang siswa sekolah. UN merupakan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Syamsul menjawab pertanyaan media tentang urgensi pelaksanaan UN bagi siswa tingkat SMA untuk memberikan peluang meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi.

“Bagi kami di DPR, UN bukan satu-satunya penentu untuk kelulusan. Tetapi semacam pemetaan kualitas pendidikan kita secara nasional,” jelas politisi Partai Golkar di sela-sela peninjauan pelaksanaan UN di SMA 17 Makasar, Sulsel, Senin (14/4).

Dijelaskan Syamsul, Komisi X sudah menyampaikan pandangan tersebut kepada Mendikbud M. Nuh, bahwa UN jangan dijadikan satu-satunya parameter untuk siswa lulus dan masuk ke perguruan tinggi. Pertimbangan sekolah harus menjadi acuan.

Menurutnya, peran UN 40% dan 60% adalah peran sekolah dimana anak-anak itu menuntut pendidikan.

“Karena sekolah lebih tahu, sehingga ujian nasional ini prosentasenya lebih kecil dan peran sekolah lebih besar,” tegas politisi daerah pemilihan Sulsel. (sc) foto : suci/parle/hr.

UN di Semarang Berjalan Lancar

Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional yang berlangsung di Semarang, Jawa tengah berjalan dengan lancar. Hal itu disampaikan saat Komisi X melakukan kunjungan spesifik, Senin (14/4).

Agus mengatakan, kunjungan ini dalam rangka memantau dan melihat secara langsung pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi tersebut. Kita juga ingin melihat apakah distribusi kertas ujian sudah tepat waktu dan sampai ke anak didik apa belum,” ujarnya.

Disisi lain, Komisi X DPR juga ingin mendapatkan masukan terkait kualitas lembar kertas ujian. Pasalnya kertas yang ada sekarang ini sudah lebih tebal dibandingkan kertas tahun lalu. “Sekarang ini kertasnya 100 gram sementara tahun lalu masih 70 gram, jadi lebih mudah dalam melakukan scanning (pemindaian) nilai ujiannya,” katanya.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto saat memantau pelaksanaan UN di Semarang.

Menurut Agus, Pihaknya juga ingin mendapatkan masukan terkait kondisi situasional dan emosional anak didik dalam melaksanakan Ujian Nasional SMA, SMK ataupun MA.

“Kita minta masukan apa saja ke depan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan Ujian Nasional, dan masukan itu akan disampaikan kepada Mendikbud M. Nuh terkait pelaksanaan Ujian Nasional diberbagai daerah,” ujarnya.

Sementara Kepala Sekolah SMAN 5 Semarang Titi Priatningsih mengatakan, soal distribusi UN sudah berjalan

aman dan lancar tanpa persoalan yang berarti. Selain itu, Pihak Sekolah telah melakukan pengawasan silang penuh tanpa melibatkan guru pelajaran yang diujikan.

“Lembar jawaban, sudah lebih baik dan terkait kondisi siswa secara umum dilaporkan kondusif dan tidak nervous seperti yang digambarkan di televisi,” terangnya.

Menurutnya, SMAN 5 Semarang telah melakukan persiapan yang cukup dan pendalaman materi bagi siswa-siswa yang akan melaksanakan Ujian Nasional. (si) foto: sugeng/parle/hr.

DPR Yakin Soal UN Tidak Bocor



Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur.

Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur menyakini soal Ujian Nasional (UN) tidak bocor, meski puluhan amplop

soal tiba di sejumlah sekolah di Kota Batam Kepulauan Riau dalam kondisi robek.

“Tidak ada kebocoran soal, amplop robek karena perjalanan yang jauh,” kata Asman Abnur usai melakukan peninjauan pelaksanaan UN di SMKN 4 dan SMAN 1 bersama rombongan Komisi X lainnya, di Kota Batam, Senin (14/4).

Menurut dia, ada dua kemungkinan amplop soal sobek di sekolah, yaitu karena perjalanan panjang dari Bandung ke Kepri karena pengemasan

amplop yang tidak bagus, dan adanya upaya untuk mengintip dan mengambil soal.

Ia menambahkan, kemungkinan adanya upaya mengintip dan mengambil soal sangat kecil. “Distribusi dari Bandung ke Pelabuhan Kijang, Bintan hingga ke sekolah-sekolah dilakukan dengan pengawasan ketat aparat kepolisian,” jelasnya.

“Kemungkinan itu disengaja untuk melihat soal, agak tipis. Karena distribusi dijaga polisi,” kata dia. (Ant/nt) foto : iwan armanias/parle/hr.

Komisi X DPR: Isu Kebocoran Soal UN Tidak Benar



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto saat diwawancara wartawan.

Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto mengatakan isu kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2014 tidak bisa dipercaya kebenarannya karena paket soal yang dibuat dalam banyak variasi.

Demikian dikatakan Agus Hermanto bersama rombongan Komisi X DPR melakukan kunjungan dalam rangka memantau pelaksanaan UN di beberapa sekolah menengah atas di Semarang, Senin (14/4).

Menurutnya isu tersebut tidak dapat dipercaya karena untuk sekarang ini saja, variasi soal UN ada 20 paket, sementara peserta ujian dalam satu ruangan sebanyak 20 orang.

“Setiap peserta UN akan mendapatkan paket soal yang saling berbeda, atau dengan kata lain



tidak ada siswa yang mengerjakan soal yang sama dalam setiap ruang kelasnya,” tegasnya.

Ia menambahkan isu kebocoran soal diyakininya tidak bisa terbukti, “Apa mungkin dalam waktu sekejap itu bisa 20 variasi soal? Sehebat apapun, profesor apapun tidak mungkin bisa,”

ujarnya.

Di Semarang, rombongan anggota Komisi X DPR RI bersama Rektor Universitas Negeri Semarang melakukan pantauan UN di sejumlah sekolah, seperti SMA Negeri 5, SMK Negeri 7, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Semarang.

Setelah melakukan pantauan pelaksanaan UN, rombongan Komisi X DPR RI berdialog dengan jajaran pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Unnes, dan Universitas Diponegoro Semarang di kampus Unnes. (si/nt). foto : sugeng/parle/hr.

Kebocoran Soal UN Hanya Isu

Tersiar kabar di kalangan masyarakat, Ujian Nasional (UN) tingkat menengah atas tahun ini mengalami kebocoran soal. Sehingga, sempat beredar terjadi jual beli soal yang persis sama dengan soal-soal yang di-UN-kan, bahkan jual beli jawaban.

“Kebocoran soal tidak ada, itu hanya isu. Itu dilakukan oknum-oknum tertentu yang membuat soal kisi-kisi UN, dan menyebarkan kepada masyarakat. Seolah-olah itu dijadikan bocoran soal UN. Kami di lapangan tidak melihat adanya kebocoran. UN tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya, semoga bisa dipertahankan, dan dapat ditingkatkan,” ujar Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore, saat ditemui di Gedung Nusantara, baru-baru ini.

Ia menilai, isu ini disebar oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan soal-soal ujian. Mungkin soal-soal itu hanya mirip, namun tidak sama persis dengan soal-soal yang diujikan.

Sempat beredar juga isu soal kisi-kisi UN yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berbeda dengan yang dihadapi siswa, terutama soal Bahasa Indonesia.

“Secara teknis, saya belum tahu, mengenai kisi-kisi itu benar atau tidak. Tapi, menurut isu di lapangan, ada terjadi perbedaan yang signifikan antara yang mereka dapatkan atau mereka pelajari dengan soal yang mereka hadapi ketika ujian,” ujar Jefri, panggilan akrab Jefirstson.

Politisi Demokrat ini mengingatkan, berbagai isu itu jangan sampai membuat siswa makin stres. Sehingga, mereka dapat berkonsentrasi men-



Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore.

jalankan ujian. Termasuk dengan pengawasan, yang bahkan sampai melibatkan aparat keamanan bersenjata dan teknologi CCTV.

“Siswa-siswi itu stres karena menghadapi tekanan dari sekolahnya. Walaupun dikatakan ujian tidak sulit, tetap saja mereka stres. Ada baiknya penggunaan CCTV, untuk menggantikan sebagian pengawas. Bahkan, katanya ada polisi juga. Ini bisa mengganggu. Kita menghindari, anak-anak ini jangan terlalu dibebani dengan adanya UN ini,” jelas Politisi asal Dapil NTT ini.

Sebagaimana diketahui, komposisi UN tahun ini adalah 60% ujian nasional,

sisnya ujian sekolah. Jefri berharap, kebijakan ini perlu dievaluasi lagi.

“UN bertujuan untuk pemetaan kualitas pendidikan kita. Dengan pemetaan ini, kita bisa tahu, sampai dimana kemampuan siswa-siswi kita. Kami tetap menganggap bahwa UN ini penting dan perlu dilaksanakan. Namun, untuk pelaksanaannya perlu dievaluasi kembali. Sekarang kan UN itu 60 persen ujian nasional, dan 40% ujian sekolah. Kami mengharapkan, ke depannya paling tidak 50% nasional, 50% sekolah. Maka, seterusnya nanti bisa 40% nasional, 60% daerah,” harap Jefri. (sf) foto : naefurodjie/parle/hr.





KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI X DPR RI

Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto bersama Tim Komisi X didampingi Rektor UNES Fathur Rokhman, meninjau kesiapan pemindaian jawaban soal UN 2014 di UNES (Universitas Negeri Semarang) Jawa Tengah.

foto: sugeng/parle/hr.





Wakil Ketua Komisi X DPR RI Syamsul Bachri memantau pelaksanaan UN 2014 beberapa SMA di Makasar Sulsel.



foto: suciati/parle/hr.

Publik Menilai Pimpinan KPK Pilihan DPR Cukup Berhasil

Siapapun boleh mempermasalahkan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah pimpinan lembaga negara yang berlangsung di DPR. Namun sejauh ini fakta menunjukkan, publik memberikan apresiasi terhadap kinerja pimpinan lembaga negara seperti KPK - yang dipilih DPR karena dinilai cukup berhasil.

Pandangan ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI Yahdil Abdi Harahap saat menanggapi upaya uji materi UU KPK dan UU KY di MK yang mempersoalkan keterlibatan DPR dalam menentukan calon anggota KPK dan KY. Keterlibatan DPR dalam memilih pejabat sejumlah lembaga negara tertentu menurutnya diatur UU yang merupakan *breakdown* dari konstitusi. Pilihan ini bisa diterjemahkan sebagai bentuk kedaulatan rakyat melalui wakilnya di parlemen.

“Pimpinan KPK pilihan DPR secara umum cukup berhasil mulai dari era Pak Antasari sampai terakhir Abraham Samad, terbukti mereka mendapat apresiasi masyarakat. Proses seleksinya terbuka dan melibatkan publik, demikian pula pimpinan KY, kalau ada hal yang mengecewakan itu karena benturan kewenangan, masalahnya ada di UU,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (16/4/14).

DPR dalam hal ini Komisi III terus berupaya memperbaiki



Anggota Komisi III DPR RI Yahdil Abdi Harahap.

transparansi diantaranya dengan melibatkan Tim Pakar dari berbagai disiplin ilmu seperti pada *fit and proper test* calon Hakim Konstitusi beberapa waktu lalu. Interaksi wakil rakyat yang mendengar aspirasi dari LSM dan kelompok masyarakat lain yang membuat proses seleksi semakin baik.

“Beberapa kali kita menerima masukan tentang kandidat yang memiliki rekam jejak negatif dari LSM dan kita tindak lanjut dalam proses akhir. Ada kok kandidat yang gagal terpilih setelah kita menerima masukan dari publik. Inikan positif,” lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut 2 ini.

Bagi politisi Fraksi PAN ini apabila ada warga negara yang tidak puas dengan proses itu dan mengajukan uji materi ke MK, tentu hal tersebut adalah hak asasi yang juga dilindungi. Demikian pula apabila kemudian MK mengabulkan uji materi UU KPK dan UU KY serta mencabut kewenangan DPR, itu menurutnya juga harus dihormati.

MK saat ini sedang menyidangkan uji materi UU KY dan UU KPK yang diajukan Rektor Universitas Islam Indonesia, Edy Suandi Hamid. Ia berpendapat kewenangan DPR dalam memilih pimpinan KY dan KPK dapat mempengaruhi independensi lembaga. (iky) foto: doc/parle/hr.

Masyarakat Adat Harus Dilindungi

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI sedang menyusun RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). RUU ini sudah tersusun dengan baik dan progres terakhir Pansus sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada pemerintah.

Ketua Pansus RUU PPHMHA Himmatul Aliyah Setiawaty (F-PD) saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/4), menjelaskan, masyarakat hukum adat (MHA) perlu dilindungi dengan UU. Dan hal ini merupakan amanat UUD NRI tahun 1945 pasal 18B. Bahkan, penyusunan RUU ini merupakan seruan pula dari Deklarasi PBB dan Konvensi ILO, agar semua anggota PBB melindungi MHA.



Ketua Pansus RUU PPHMHA Himmatul Aliyah Setiawaty.

Declaration on Indigenous Peoples (Deklarasi Bangsa-Bangsa Pribumi) sudah dikumandangkan PBB beberapa tahun lalu. Dan sebagian anggota PBB seperti Brazil dan Australia sudah memiliki UU yang melindungi MHA-nya masing-masing. Dan kini, Indonesia pun harus memiliki UU tersebut. Kelak, bila sudah disahkan, RUU PPHMHA bisa menjadi salah satu UU yang monumental dari DPR RI.

“Terakhir kita sudah menyerahkan DIM ke pemerintah. Intinya, RUU yang membahas masyarakat hukum adat ini tidak bisa berdiri sendiri. Masih terkait dengan sinkronisasi perundang-undangan lainnya,” kata Himmatul. RUU ini, kata Himmatul, sangat terkait dengan RUU Agraria yang juga sedang dibahas oleh Komisi II DPR. Jadi, RUU ini perlu menunggu pembahasan RUU Agrariannya tuntas.

Selain itu, lanjut Anggota Komisi III DPR tersebut, RUU PPHMHA perlu sinkronisasi dengan UU sektoral lainnya, seperti UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Pemda, UU Penataan Ruang, dan UU HAM. Pansus sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah di Tanah Air yang memiliki komunitas MHA. Tujuannya untuk menyerap pandangan dan aspirasi langsung dari MHA.

RUU yang sudah tersusun ini berisikan 58 pasal dan 11 bab. Di dalamnya mengatur tentang lembaga adat yang berperan mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA. “Sejauh ini, kami masih menerima masukan dari komunitas adat,” ungkap Himmatul. Rencananya, pembahasan RUU ini akan dilanjutkan usai reses DPR pada Mei mendatang. (mh) foto: *naefurodije/parle/hr*.

Seharusnya E-KTP Berfungsi Dalam Segala Hal



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP seharusnya sudah multi fungsi atau berfungsi dalam segala hal. Termasuk bisa mengatasi kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2014. Apalagi dana yang dikeluarkan untuk pembuatan E-KTP mencapai Rp 6 triliun lebih. Kekisruhan DPT terjadi pada setiap pemilu dan pada pemilu kali ini kasus serupa

terjadi lagi.

Dalam perbincangannya dengan TV Parlemen mengevaluasi pelaksanaan pemilu legislatif baru-baru ini, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, politisi PKS ini mengatakan kekisruhan DPT merupakan problem lama yang terus terulang kembali, karena itu ke depan harus dituntaskan.

“Kita berharap dengan adanya e-KTP, persoalan-persoalan yang terkait dengan kependudukan termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), harusnya tuntas. Karena itu saya selalu minta kepada Mendagri, agar pembuatan e-KTP yang sudah menelan dana hampir Rp 7 triliun rupiah itu bisa multi fungsi, bisa berfungsi segala hal,” tegasnya.

Bahkan kata Sohibul, persoalan pengendalian terorisme juga bisa dilacak melalui e-KTP apalagi nantinya ada kerja sama dengan Singapura. Selain itu, menurut pimpinan dewan ini ada kecenderungan pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan DPT ini. Ada kejadian di sejumlah dapil, ternyata DPTnya melebihi angka riilnya, tetapi di Dapil yang lain justru lebih kecil dari yang sebenarnya.

Ia optimis kalau kita memiliki data-data yang baik dan semuanya bertekad menyelesaikan masalah ini maka ke depan pemilu akan berlangsung lebih baik. “Janganlah bermain-main di lapangan yang tidak *fair*. Kalau mau menang dalam pertarungan apapun hendaknya dengan cara-cara yang obyektif bukan pada manipulasi data,” tandas Sohibul.

Intinya banyaknya kelemahan yang terjadi pada pemilu kali ini adalah kelemahan bersama dan bersama-

sama pula untuk memperbaiki. Sebab kalau tidak diperbaiki yang akan rugi adalah masyarakat. Perbaikan DPT harus segera dilakukan menjelang pemilu Presiden yang akan berlangsung pada 8 Juli 2014. Sementara putaran kedua berlangsung pada 8 September 2014.

Kisruh DPT pernah diungkap Forum Akademisi IT (FAIT) bahwa DPT Pemilu 2014 masih memuat pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama orang yang sudah meninggal dunia, nama pemilih ganda, dan pemilih dengan nama-nama aneh.

Bahkan diduga, kisruh DPT Pemilu 2014 merupakan ba-

gian dari skenario kecurangan pemilu. Alasannya, penyusunan DPT sudah melalui 6 (enam) tahapan, namun DPT belum beres, bahkan masih memuat pemilih siluman berkisar antara 15 hingga 25 juta pemilih.

Hal ini membuat Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah angkat bicara dengan mengatakan, “Lebih baik dia datang ke KPU untuk membantu kami. Ini bentuk partisipasi masyarakat.” Senada dengan Ferry, Komisioner KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay mengatakan, siapa saja yang memiliki temuan kisruh DPT agar datang untuk membantu KPU memperbaikinya. (mp) foto: iwan armanias/parle/hr.

Komisi V Harapkan Semua Jalan Mulus

Anggota Komisi V DPR RI, Wardatul Asriah menilai siapapun partai pemenang pemilu 2014 nanti haruslah tetap memperhatikan kebutuhan rakyat, termasuk salah satunya adalah kebutuhan akan kondisi jalan yang mulus. Hal tersebut diungkapkan Wardah, begitu ia biasa disapa, kepada Parle baru-baru ini.

“Kondisi jalan yang mulus merupakan syarat mutlak bagi berkembangnya perekonomian masyarakat. Bagaimana tidak, dengan kondisi jalan yang tidak bolong-bolong tentu akan mempermudah segala sesuatunya, termasuk pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain,” papar Politisi dari Fraksi PPP ini.

Dilanjutkan Wardah, dirinya juga menyesalkan jalan lintas pantura (Pantai Utara) Jawa yang kondisinya selalu rusak. Padahal jalur lintas pantura itu merupakan jalur yang cukup penting, karena meliputi Karawang dan Subang yang notabene merupakan daerah produsen beras terbesar atau bisa



Anggota Komisi V DPR Wardatul Asriah.

dikatakan lumbung padi nasional. Dengan adanya jalan yang rusak, dapat dipastikan pasokan beras pun akan terhambat.

Selain itu jalan rusak juga sangat rawan kecelakaan, terlebih lagi saat

musim mudik tiba. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, ia berharap agar ke depannya semua jalan yang berlubang khususnya di lintas pantura dapat segera diperbaiki. (Ayu) foto: ayu/parle/hr.

Pendidikan Jangan Dipolitisasi

Ujian Nasional tingkat menengah atas dimulai dari kemarin, Senin (14/04). Namun, ada hal yang cukup menjadi sorotan. Di tengah kondisi politik Indonesia yang cukup memanas, ada nama salah seorang Calon Presiden disebutkan pada soal Bahasa Indonesia.

Soal cerita yang cukup jelas menggambarkan tentang kehidupan positif Joko Widodo itu dianggap sebagai pencitraan kepada pemilih pemula. Dikhawatirkan, ini menjadi ajang kampanye terselubung.

“Kami mengharapkan UN benar-benar mengatur pendidikan anak-anak

kita, jangan dimasuki isu politik yang mengganggu anak-anak. Politik tidak boleh menunggangi pendidikan. Ini dalam tanda petik bisa disebut kampanye terselubung,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Jefirstson Riwu Kore, ketika ditemui usai mengisi acara di TV Parlemen bertajuk Semangat Pagi, di Gedung Nusantara II, Selasa (15/04).

Politisi Demokrat ini menginginkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan investigasi terhadap lolosnya isu politik pada soal UN. Kemendikbud harus memberikan kontrol terhadap kelalaian ini.

“Saya mendorong ke depannya pemerintah benar-benar memberikan kontrol. Ini bentuk kelalaian pemerintah, kenapa soal seperti itu bisa lolos. Harus diinvestigasi dulu. Memang ada niat sungguh-sungguh, atau karena dia pendukung Jokowi,” tambah Jefri, panggilan akrab Jefirstson.

Untuk itu, ia mengharapkan Kemendikbud dapat memberikan sanksi



Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore.

kepada pihak pembuat soal. Ia menegakkan, pendidikan Indonesia jangan sampai dipolitisasi.

“Kami mengharapkan ada sanksi dari Kemendikbud terhadap orang-orang yang membuat soal UN. Jangan ada niat-niat dari oknum tertentu untuk mempolitisasi anak-anak atau pendidikan Indonesia. Soal jenis sanksinya, itu ranah teknis Kemendikbud yang akan menentukan,” ujar Politisi asal Dapil NTT ini.

Ia menyarankan, untuk soal-soal yang menggunakan objek tokoh nasional, bisa menggunakan pahlawan nasional, atau tokoh non politik. “Harusnya pemerintah juga netral, jangan memihak kepada salah satu pihak, terutama politisi,” tutup Jefri. (sf) foto: [naefurodjie/parle/hr](#).

Karut Marut Pileg Jangan Terjadi Pada Pilpres

Karut marut distribusi logistik pada pemilu legislatif tanggal 9 April lalu jangan sampai terjadi pada pemilihan umum (pemilu Presiden) tanggal 8 Juli mendatang. Karut marut distribusi yang mengakibatkan digelarnya pemilu ulang harus diantisipasi sehingga tidak terjadi pada pilpres.

Demikian ditegaskan anggota DPR Arwani Thomafi berkaitan dengan pelaksanaan pileg dan menyongsong pemilu Presiden mendatang. Ia mendesak supaya KPU melakukan evaluasi secara tepat terkait dengan potensi dan fakta yang terjadi pada gelaran pileg.

Menurut politisi PPP ini, karut marut tertukarnya kartu suara di beberapa Dapil cukup menyulitkan sehingga akhirnya digelar pemilu ulang. “Dua hal ini sudah kelihatan nyata terjadi pada pileg. Saya harapkan hal itu tidak terulang kembali pada Pilpres,” ia menjelaskan.

Dia tetap mendesak, kasus tertukarnya kartu suara harus diusut, bagaimana sampai kesalahan distribusi itu terjadi. Jangan sampai hal ini dijadikan titik lengah munculnya potensi kecurangan pada pilpres. Satu hal kata Arwani, kekurangan kita terkendala



Anggota DPR Arwani Thomafi.

problem anggaran dan kekurangan aparat. Karena itu ke depan titik-titik rawan, daerah-daerah yang rawan harus dilakukan penambahan aparat pengawas pemilu.

“Ini perlu dijadikan bahan untuk perbaikan pemilu ke depan,” ia menegakkan.

Ditanya soal partisipasi pemilihan yang rendah, kata mantan Pimpinan Pansus RUU Pemilu ini, sebenarnya UU

Pemilu telah memberikan ruang yang luar biasa luasnya sehingga tidak ada celah untuk tidak menggunakan hak pilih atau *nyoblos*. Masih banyaknya masyarakat yang tidak datang ke TPS bukan karena sulitnya mendapatkan akses untuk ke tempat pemungutan suara.

“Saya kira masalahnya kompleks, yang terbanyak saya kira masyarakat belum ada pilihan akibat ketidakpercayaan kepada parpol dan anggota

DPR. Ini harus kita terima sebagai masukan,” tukas Arwani.

Dia menyatakan yakin, regulasi yang diputuskan DPR bersama pemerintah benar-benar telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam regulasi itu rakyat diberi kesempatan untuk bisa menggunakan hak

pilihnya dimana saja, tidak ada alasan untuk tidak bisa mencoblos. “Berarti sosialisasinya yang masih rendah,” ia menambahkan.

Hasil pemilu legislatif tahun 2014 ini diharapkan Arwani Thomafi akan meningkatkan kinerja parpol dan anggota DPR ke depan. Dari catatan Parlemen, melihat perolehan suara

parpol yang tidak mencapai 20% maka kemungkinan muncul koalisi parpol untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Dari perolehan suara ke 10 parpol tersebut bisa muncul 3 pasangan capres dan cawapres. Bila ini terjadi maka kemungkinan akan terjadi dua putaran pilpres. Putaran pertama tanggal 8 Juli dan putaran kedua pada 8 September 2014. (mp) foto: naefurodjie/parle/hr.

Polri Harus Lindungi Penyelenggara Pemilu yang Terancam

Pemilu Legislatif memasuki tahap penghitungan suara mulai dari PPS, PPK sampai ke tingkat KPU Kabupaten/Kota. Kelancaran tahapan ini dipastikan akan terganggu apabila para penyelenggara pemilu yang bertugas mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu.

“Perlu koordinasi antara penyelenggara pemilu baik yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dengan aparat kepolisian. Dalam kondisi biasa saja diamankan apalagi kalau mendapat ancaman, itu harus ya,” kata anggota Komisi III DPR RI M. Nurdin saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/4).

Dalam rapat kerja beberapa waktu lalu menurutnya Kapolri menyatakan sudah memetakan sejumlah wilayah yang diperkirakan rawan. Namun dinamika pemilu bisa saja terjadi perubahan, misalnya dilakukan oleh caleg dan pendukungnya yang tidak siap menerima kegagalan.

“Kalau memperhatikan kondisi keamanan sejauh ini cukup terkendali, seperti di dapil saya Jabar X berlangsung tertib. Kita tentu minta Polri tanggap terhadap dinamika yang terjadi di daerah lain,” ujar Politisi Fraksi PDIP ini.

Mantan Kapolda Sumatera Utara ini memberikan apresiasi kepada seluruh aparat Polri yang sudah bekerja keras mewujudkan keamanan selama proses pelaksanaan pemilu legislatif. Ia berharap anggaran pengamanan pemilu sebesar Rp.1,6 triliun dapat digunakan secara efektif.



Anggota Komisi III DPR M. Nurdin.

Sejumlah kasus terhadap penyelenggara pemilu mengemuka di sejumlah daerah seperti di NTB, Ketua KPU Kabupaten Bima diancam dengan parang oleh sekelompok orang dan dipaksa melakukan penghitungan ulang. Sementara KPUD Trenggalek, Jatim menerima surat kaleng berisi ancaman pembunuhan. (iky) foto: andri/parle/hr.

Pembentukan Pengadilan Keluarga Didukung

Anggota Komisi III DPR RI Himatull Alyah Setiawaty menyatakan mendukung usulan pembentukan pengadilan keluarga (*family court*). Langkah ini diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan terutama bagi perempuan yang sering berada pada posisi yang lemah.

“Saya mendukung seribu persen agar usulan pembedan

Pengadilan Keluarga ini, segera direalisasikan oleh Mahkamah Agung. Kita di DPR dalam posisi siap mendukung apabila ada regulasi yang perlu penyesuaian,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/4).

Ia menyebut dalam sejumlah kasus perceraian yang dilatarbelakangi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) perempuan paling banyak dirugikan. Pasalnya pengadilan



Anggota Komisi III DPR Himatul Alyah Setiawaty.

agama tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kekerasan seperti pemukulan dan penyiksaan karena sudah masuk area pidana.

“Istri yang mengalami kasus pemukulan, KDRT biasanya terpaksa mengajukan cerai ke pengadilan. Sementara dalam sejumlah aturan pihak yang mengajukan cerai bisa jadi malah kehilangan hak-haknya, sudah dipukuli hak hilang pula,” tandasnya.

Penanganan kasus ini di Pengadilan Keluarga diharapkan dapat memberi ruang kepada hakim untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal pidana sehingga akan lebih berkeadilan terutama bagi perempuan. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengaku akan membawa isu ini dalam persidangan yang akan datang.

Pada kesempatan berbeda LBH APIK melontarkan data terbaru yang menunjukkan semakin banyak istri yang mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama yaitu 59,32 persen. Pada sejumlah kasus, apabila berada pada posisi penggugat perceraian maka istri akan kehilangan haknya seperti memperoleh nafkah iddah dan atau uang mut’ah.

(iky) foto: naefurodjie/parle/hr.

Wacana Pencabutan Hak Eksklusif Parpol Tidak Tepat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja menilai adanya wacana untuk mencabut hak eksklusif Partai Politik (Parpol) dalam memilih calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) adalah tidak tepat. Hal itu diungkapkan Politisi dari Fraksi PAN kepada Parle, Selasa 15/4).

“Konstitusi melalui Undang-undang memang memberi ruang yang luas kepada parpol untuk menentukan capres dan cawapres. Tapi tentu semua kembali kepada masyarakat, apakah mendukung capres dan cawapres tersebut atau tidak. Kalau memang capres tersebut tidak berkualitas atau tidak seperti yang diharapkan, ada mekanismenya. Bisa dengan tidak memilih Capres atau Cawapres itu lagi. Memilih presiden dan wapres itu kan tidak seperti main bola, kalau tidak bagus atau tidak suka dapat langsung dicabut atau digantikan, ada mekanismenya. Ini sekaligus pembelajaran politik untuk masyarakat,” papar Hakam.

Dilanjutkan Hakam, dalam mengamandemen UUD 1945 anggota Dewan tentu bukan proses yang gampang dan sebentar. Butuh waktu bertahun-tahun dan pemikiran yang mendalam. Begitupun jika harus mengamandemen Pasal 22e UUD 1945 tentang yang mengusulkan (memilih) capres dan cawapres adalah parpol.

Hakam menilai masih ada Undang-undang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang rencananya akan diubah dalam pemilihan presiden mendatang (Tahun 2019-red). Jika memang diinginkan, ide tentang usulan nama capres dan cawapres tidak hanya bisa diusulkan oleh Parpol itu bisa dimasukkan di dalam UU Pilpres tersebut. Bukan malah mengamandemen Pasal 22e UUD 1945 yang memberikan hak eksklusif kepada Parpol untuk mengusulkan nama Capres dan Cawapres.



Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja.

Beberapa waktu lalu Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putrasidin seperti yang dilansir media massa sempat berpendapat akan pencabutan hak eksklusif Parpol untuk memilih pasangan Capres dan Cawapres. Karena menurutnya, dalam mengusung calon pemimpin yang bisa dipilih rakyat, parpol hanya mengandalkan popularitas dan elektabilitas.

“Itu artinya, parpol tak sanggup menghadirkan calon pemimpin yang berkualitas. Sebab itu, hak eksklusifnya untuk memilih pasangan capres/cawapres layak dicabut,” kata Irman kepada wartawan. (Ayu) foto: naefurodjie/parle/hr.



Perlu Dikaji Pengadaan Gudang Berpendingin

Kementerian Perdagangan berencana akan membangun gudang berpendingin untuk menyimpan komoditas pertanian, agar para petani bisa mengatur penjualan hasil komoditasnya saat masa panen tiba. Sebagai gagasan, rencana ini sangat diapresiasi. Namun, implementasinya perlu dikaji ulang, karena banyak pembangunan gudang akhirnya terbengkalai.

Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi (F-PD), saat dihubungi melalui saluran telepon, Senin (14/4), berpendapat, gagasan Kemendag sangat bagus. Hanya saja perlu mempertimbangkan beberapa komoditas yang mungkin tidak tahan lama disimpan di gudang berpendingin tersebut. Komoditas seperti cabai tidak layak masuk ke dalam gudang, karena tidak tahan lama. Yang bagus masuk gudang adalah kentang dan komoditas biji-bijian, seperti kedelai dan padi.

“Itu gagasan yang bagus sekali. Hanya saja jangan sampai harga sewanya lebih mahal dari harga produksinya,” harap Atte. Seperti diketahui, Kemendag sendiri berencana mecewakan gudang berpendingin kepada para petani dengan harga Rp300/kg/bulan untuk komoditas bawang merah. Untuk tahap pertama, Kemendag akan membangun gudang berpendingin di Brebes, Jateng sebagai sentra bawang merah. Lalu ada pula gudang di Boyolali, Jateng, untuk sentra cabai.

Melihat penempatan gudang berpendingin tersebut, Atte justru melihat, sebenarnya Boyolali merupakan sentra produk susu, buka cabai. Tapi kalau Brebes, memang, sudah tepat sebagai sentra bawang merah. Pembangunan gudang berpendingin, sekali lagi kata Atte, perlu kajian konfrensi kembali. UU No.9/2011 tentang



Anggota Komisi VI DPR Atte Sugandi.

Resi Gudang yang dirumuskan Komisi VI juga sebenarnya sudah mengatur seputar pembangunan gudang untuk membantu produktifitas pertanian.

Atte lalu mencontohkan, di Lampung Tengah sudah ada gudang yang baru berjalan pemanfaatannya, yaitu untuk penyimpanan kopi. Begitu juga di Makassar sudah ada gudang untuk komoditi coklat. Namun, hingga kini, pemanfaatan gudang tersebut tidak optimal. (mh) foto: naefurodjie/parle/hr.

Komisi VIII Sambut Positif Posko Pengaduan UN oleh KPAI



Anggota Komisi VIII DPR, Adang Ruchiatna.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Adang Ruchiatna menyambut positif langkah KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang notabene merupakan mitra kerja Komisi VIII dalam membuka posko pengaduan ujian nasional (UN).

Hal tersebut diungkapkan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan kepada Parle, Senin (14/4).

“Itu suatu usaha yang sangat bagus dari KPAI demi terlindunginya hak asasi anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Seperti diketahui sebelumnya banyak kasus siswa tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Nasional karena hal-hal yang berhubungan dengan administrasi, seperti belum membayar sekolah atau lainnya,” jelas Adang.

Dengan adanya Posko Pengaduan UN itu ditambahkan Adang, siswa akan terlindungi. Sehingga jika ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak anak dalam mengikuti UN, akan dapat dengan segera ditindaklanjuti oleh KPAI, sebagai sebuah lembaga Negara yang berwenang dalam

memberikan perlindungan kepada anak Indonesia.

Sementara itu dalam siaran persnya pada Sabtu (12/4) Ketua KPAI Asrorun Niam mengatakah bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan khusus dan membuka Posko Pengaduan mulai hari ini (Senin, 14/4) terkait diselenggarakannya Ujian Nasional untuk Tingkat SLTA.

“Seluruh Tim Pengawas KPAI akan melakukan *fact finding* terhadap fakta-fakta pelanggaran yang ada di lapangan, baik pelanggaran etika evaluasi hasil belajar siswa, maupun pelanggaran hak anak. hal ini sebagai upaya untuk memastikan agar semua anak Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan optimal,” ungkap Niam kepada wartawan. (Ayu) foto: andri/parle/hr.

DPR Akan Akhiri Tugas Dengan Khusnul Khotimah

Pernyataan yang meminta KPK me-waspada korupsi besar-besaran DPR di akhir masa jabatan, hendaknya dilihat sebagai *warning* atau peringatan. “Sepanjang untuk perbaikan lembaga, pernyataan itu boleh-boleh saja tetapi asal obyektif dan tidak untuk menebar kebencian,” kata anggota DPR Deding Ishak kepada Parlemen, Senin (14/4) di Jakarta.

Hal itu dikemukakannya menanggapi kekhawatiran Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie N. Massardi agar KPK perlu mewaspada terjadi korupsi besar-besaran DPR menjelang berakhirnya masa jabatan pada akhir September 2014. Ada dua modus yang kemungkinan dapat dilakukan, yakni melalui pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dan anggaran.

Dalam pembahasan RUU, kata Adhie, para anggota Dewan akan mempercepat pembahasan dan dari sisi anggaran akan “memainkan” anggaran melalui Badan Anggaran (Banggar) terkait persetujuan anggaran proyek-proyek di pemerintahan.

Menurut Deding Ishak, pernyataan mantan jubi Presiden Gus Dur itu perlu diambil positifnya saja dan DPR perlu mendengar dalam rangka perbaikan ke depan. “Jadi semangatnya untuk saling mengingatkan sehingga



Anggota DPR Deding Ishak.

DPR bisa bekerja lebih baik,” ujarnya.

Dia dan rekan-rekannya, kata politisi Golkar ini, dalam mengisi kegiatannya hingga akhir masa jabatan pada 30 September mendatang tetap optimis akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Beberapa tugas konstitusional akan tetap dijalankan seperti menyelesaikan sejumlah RUU, penyusunan RAPBN 2015 dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan program-program pemerintah lainnya.

Lagi pula, sambung Deding, pembahasan RUU dan penyusunan ang-

garan, secara teknis sudah ada aturan yang ketat mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Di sisi lain, di era penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan saat ini para anggota Dewan akan lebih berkonsentrasi melakukan tugas-tugasnya bagi kepentingan rakyat.

“Saya optimis, para anggota Dewan akan meninggalkan hasil karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, dan bertekad mengakhiri tugasnya dengan *khusnul khotimah*,” jelas Deding menambahkan. (mp) foto: iwan armanias/parle/hr.

BK: Anggota DPR Terlibat Politik Uang, Pidanakan Saja

Badan Kehormatan - BK DPR RI mengimbau kepada masyarakat yang menemukan keterlibatan anggota DPR atau caleg inkumben dalam politik uang agar dilaporkan kepada aparat berwenang Bawaslu atau Kepolisian. Sebagai pen-jaga kehormatan anggota dewan BK dalam posisi mendo-rong kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Politik uang dalam pemilu sudah masuk ranah pidana, jadi kalau ada anggota DPR terlibat segera laporkan saja. BK akan mengawal dan menyesuaikan karena pelanggaran

pidana otomatis adalah pelanggaran etik,” kata anggota BK Ali Maschan Moesa di Jakarta, Senin (14/4/13).

Menurutnya larangan politik uang tegas diatur dalam UU no.8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dikuatkan dengan peraturan KPU no.15 tahun 2013. Sanksi bagi pelaku adalah kurungan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.24 juta.

Politisi PKB ini menyatakan apabila ada warga masyara-



kat ingin menyampaikan laporan langsung kepada BK, ia menyatakan siap menerima. “Silahkan saja sampaikan laporan kepada Sekretariat BK, tentu sebaiknya diperkuat dengan bukti-bukti,” ujarnya.

Ia menambahkan dalam kasus ini BK akan berkoordinasi dengan kepolisian dan mengambil langkah berdasarkan perkembangan kasus. Sesuai dengan Tata Tertib apabila pelaku telah ditetapkan sebagai terdakwa maka BK segera melaporkan kepada rapat paripurna untuk segera memutuskan sanksi pemberhentian sementara.

Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah menyampaikan temuan dugaan keterlibatan 20 calon inkumben dalam aksi politik uang. Menurut Wakil Ketua PPATK Agus Santoso seluruh data telah diserahkan kepada KPK. (iky), foto : andri/parle/hr.

Anggota Badan Kehormatan DPR Ali Maschan Moesa.

Masalah Seleksi dan Distribusi Surat Suara Perlu Perhatian Serius



Surat suara yang akan didistribusikan.

Masalah seleksi atau penyortiran dan pendistribusian surat suara harus mendapat perhatian lebih serius dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang. Dan tak kalah penting, dalam perhitungan suara harus ada pengawasan yang ketat sebab rawan jual beli suara antara petugas dan oknum caleg.

Hal tersebut ditegaskan anggota DPR Deding Ishak kepada Parlemen-

taria saat dihubungi Senin (14/4), menanggapi banyaknya pemilih yang melakukan pemungutan suara ulang. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 571 tempat pemungutan suara (TPS) yang surat suaranya tertukar di 20 propinsi. Dengan demikian, sebanyak 571 TPS dari total 545 ribu TPS yang ada di Indonesia melakukan pemungutan suara ulang, termasuk 7 TPS di DKI Jakarta.



Anggota DPR Deding Ishak.

Deding menyatakan tetap mengapresiasi kerja KPU karena secara umum pelaksanaan pemilu 2014 ini berjalan tertib dan aman. Ia juga nampakik lantaran masih banyak TPS yang menggelar pemilu ulang, kemudian disebut KPU telah gagal. “Secara umum pemilu tahun ini berjalan lebih baik dibanding pemilu 2009 lalu baik dari persiapan maupun penyelenggaraannya. Yang masih menjadi pertanyaan adalah justru dalam perhitungan suara,” ungkap politisi Golkar ini.

Menurutnya, dalam tahap perhitungan suara ini “kita masih dalam ujian”, benarkah pemilu keempat di era reformasi ini benar-benar merupakan pesta demokrasi yang berkualitas dan demokratis. Pasalnya berdasarkan pengamatan langsung di lapangan bu-

daya transaksional dan cara-cara pragmatis dilakukan para oknum caleg.

“Ini momen yang perlu diperhatikan oleh para pengawas termasuk aparat kepolisian. Peran KPPS, Bawaslu dan KPU untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil jangan tergo da adanya oknum yang caleg yang bermain curang untuk lolos menjadi anggota legislatif,” katanya dengan menambahkan, Pimpinan Parpol juga ikut mengontrol perolehan suara sebab persaingan antar caleg di internal parpol juga cukup sengit.

Secara terpisah, anggota KPU Arif Budiman menjelaskan KPU telah menyiapkan 1000 lembar surat suara yang

tersedia di masing-masing dapil, di luar jumlah pemilih yang ada di dapil itu. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pemungutan suara ulang.

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sebagian besar permasalahan yang muncul saat Pemilu Legislatif 9 April 2014 adalah tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan. Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan tertukarnya surat suara dalam sebuah pemilu seharusnya tidak boleh terjadi karena hal itu menurutnya bukanlah sesuatu yang rumit.

Selain permasalahan tertukarnya

surat suara, Bawaslu juga mencatat beberapa kasus kecurangan oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah yang dengan sengaja sudah mencoblos surat suara sebelum pelaksanaan pemilu 9 April lalu.

Menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait mundurnya jadwal pengumuman hasil akhir penghitungan suara pileg 2014 oleh KPU akibat pemilu ulang ini, anggota KPU Arif Budiman menjamin pengumuman hasil akhir penghitungan suara pileg 2014 tidak akan mundur dari jadwal rekapitulasi akhir yang sudah ditentukan KPU yaitu tanggal 6 dan 7 Mei 2014. (mp), foto : iwan armanias/parle/hr.

Pengiriman TKI Harus Skill Ful

Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah di luar negeri, mendesak semua pihak untuk memperketat aturan dan pengawasan terhadap pengiriman TKI. Sudah saatnya TKI yang dikirim hanya yang memiliki skill full atau keterampilan khusus.

Penegasan tersebut disampaikan Okky Asokawati Anggota F-PPP saat dihubungi Parle baru-baru ini. Pernyataan Okky ini menyusul persoalan pembebasan Satinah yang baru dilakukan di saat-saat terakhir. Dengan kasus yang sering terjadi seperti ini, sebaiknya hanya TKI yang sudah lulus tes dan memiliki skill yang dikirim ke luar negeri. Dan yang tidak kalah pentingnya, harus ada aspek perlindungan yang maksimal di negara tujuan.

Okky mengeritik komitmen Menakertrans Muhaimin Iskandar saat rapat dengan Komisi IX yang hanya akan mengirim TKI formal saja. Na-

mun, sejauh ini Kemenakertrans tak memiliki langkah konkrit bagaimana mengirim TKI formal tersebut. “Pak Muhaimin sesumbar 2017 akan mengirim TKI formal saja. Tapi, ketika ditanya langkah-langkah apa saja yang sudah dipersiapkan untuk itu beserta road map-nya, Menakertrans tidak pernah menyampaikan ke DPR,” jelas Okky.

Kasus Satinah bukan yang pertama. Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Untuk itu, perlu ada terobosan mekanisme pengawasan yang ketat mulai dari rekrutmen di daerah asal calon TKI, pelatihan yang sesuai UU, hingga penerimaan di negara tujuan. “Jalur tikus seperti di Entikong Kalimantan Barat, perlu diawasi agar TKI ilegal tidak lolos ke Malaysia,” harap Okky.

Contoh pengawasan yang baik adalah ketika Kepala Disnakertrans Kupang dicopot beberapa waktu lalu, karena diduga telah memberi izin



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati.

terhadap calon TKI di bawah umur. Ini bentuk pengawasan yang baik, kata Okky. Kini, Komisi IX sedang mengamandemen UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Amandemen tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan pengawasan, agar kasus-kasus hukum yang menimpa TKI tidak ada lagi. (mh) foto: naefurodjie/parle/hr.

Setjen DPR Terima Setwan DPRD Sulsel

Sekretariat Jenderal DPR RI menerima 35 orang delegasi dari Sekretariat Dewan DPRD Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini, Setjen DPR RI diwakili Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Suratna, didampingi Kepala Bagian Pemberitaan Dadang Prayitna serta Kepala Bidang Arsip dan Dokumentasi.

Dalam pemaparan tentang Kesetjengan DPR RI, Ratno (panggilan akrab Suratna), menjelaskan bagaimana peran dari Bagian Humas dalam mendukung kegiatan Anggota Dewan. Serta, dijelaskan pula berbagai macam program yang dilakukan oleh Bagian Humas.

Salah satu program yang menjadi unggulan dari Bagian Humas adalah Parlemen Remaja. Program ini merupakan simulasi kegiatan Parlemen yang diberikan kepada perwakilan siswa tingkat menengah atas, termasuk juga mahasiswa dari seluruh Indonesia. Program ini mendapat respon



Kabag. Humas, Kabag. Pemberitaan dan Kabid. Arsip dan Dokumentasi foto bersama Setwan DPRD Sulsel.

positif dari Delegasi Setwan DPRD Sulsel.

“Ada yang menarik dari pertemuan dengan DPRD Sulsel ini. Kita ingin membangun kerjasama untuk penyelenggaraan Parlemen Remaja. Mereka sangat tertarik terhadap pendidikan politik kepada generasi muda, khususnya untuk siswa-siswi tingkat menengah atas,” ujar Ratno saat ditemui usai acara di Ruang Badan Kehormatan, Gedung Nusantara II, Rabu (16/04).

Ratno menambahkan, misi utama dari kegiatan Parlemen Remaja adalah memberikan informasi tentang tugas dan fungsi DPR, serta mekanisme persidangan. Hal-hal seperti ini perlu diketahui oleh siswa-siswi, karena banyak generasi muda saat ini yang memandang kerja Parlemen itu sangat mudah.

“Padahal, kalau kita lihat tugas dan fungsi dari DPR itu sangat berat sekali. Dengan kegiatan Parlemen Remaja, mereka dapat merasakan secara langsung bagaimana sulitnya menjadi Anggota DPR, karena mereka harus melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Hal itu harusnya bisa dipahami dan bisa dirasakan oleh mereka manakala mereka melakukan

sendiri simulasi menjadi Anggota DPR,” tambah Ratno.

Terkait dengan kegiatan Parlemen Remaja yang akan diselenggarakan di Sulsel, tambah Ratno, Setjen DPR RI akan menunggu undangan dari Setwan DPRD Sulsel. Menurutnya, Setjen DPR RI akan sangat senang jika diundang ke Sulsel dalam waktu dekat.

Selain terkait dengan program Parlemen Remaja, Ratno menyatakan ada masukan yang diterima Setjen DPR RI, yaitu terkait dengan penyaluran aspirasi dari delegasi masyarakat.

“Masukan terkait dengan penyaluran aspirasi, kalau di Sulsel, mereka memiliki ruang atau gedung tersendiri. Kalau kita masih di Gedung Nusantara, sehingga mungkin nanti bisa dipertimbangkan untuk menyediakan ruang tertentu, atau panggung demokrasi, yang sebenarnya dulu sudah ada. Namun karena tingkat efektifitasnya kurang, sehingga tidak dilanjutkan. Mungkin nanti bisa kita evaluasi, orang-orang yang demonstrasi itu kita sudah wadahi terlebih dahulu, sebelum mereka bertemu dengan Anggota Dewan,” imbuh Ratno.

Pada kesempatan yang sama, Da-

ang juga menjelaskan terkait berbagai macam program produk yang dihasilkan oleh Bagian Pemberitaan. Sebagai sarana informasi kegiatan DPR RI kepada masyarakat, Bagian Pemberitaan memiliki produk majalah dan bulletin Parlementaria, serta TV Parlemen.

“Majalah dan buletin Parlementaria kami distribusikan ke berbagai penjuru Indonesia. Bahkan sampai tingkat kecamatan, serta sekolah dan universitas. Siaran TV Parlemen juga bisa didapatkan melalui streaming, serta di layanan TV Cable,” jelas Dadang saat pertemuan.

Sementara itu, Kabag Humas Setwan DPRD Sulsel Syamsiah menyatakan apresiasinya terhadap hasil pertemuan. Ia mengaku, akan menerapkan beberapa program yang dijalankan Humas Setjen DPR RI di daerahnya.

“Kami mencari masukan-masukan yang dapat meningkatkan wawasan kami, hal-hal yang dapat kami kembangkan di daerah nantinya. Ada beberapa hal yang belum kami lakukan di daerah tapi sudah dilaksanakan di sini. Salah satunya Parlemen Remaja, ini menurut kami sangat bagus, demi pencitraan Anggota Dewan itu sendiri.

Program ini akan kami lakukan di daerah, dengan fasilitator dari DPR RI,” jelas Syamsiah.

Selain itu, tambah Syamsiah, program lain yang akan diterapkan di jajarannya adalah kunjungan Humas Setwan ke kampus, penerbitan majalah dan bu-

letin. “Kami merasa mendapat banyak masukan dari Humas Setjen DPR RI,” tutup Syamsiah. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr.

Akuisasi BTN Tunggu Izin DPR



Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana melepas kepemilikan saham Bank Tabungan Negara. Namun, rencana Kementerian yang dipimpin oleh Dahlan Iskan ini harus mendapat izin dari DPR RI.

Walaupun keputusan untuk menjual saham BTN melewati mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), namun tidak akan sah jika tidak mendapat restu dari DPR. Direncanakan, RUPSLB akan digelar Mei mendatang.

“Hasil RUPSLB tidak akan sah jika tidak mendapat izin dari DPR. Itu harus masuk ke komite privatisasi dan izin DPR. Tak bisa bank asal akuisisi BTN begitu saja,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, Rabu (16/04).

Politisi Golkar ini mengakui, sampai saat ini DPR belum menerima surat dari pemerintah terkait rencana pengalihan saham ini. Menurutnya, jika pemerintah ingin melakukan privati-

sasi BUMN, harus menyurati Kementerian Keuangan dan DPR.

“Namun, konsolidasi perbankan BUMN tidak masalah tergantung tujuannya. Misalnya, untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN,” tambah Harry.

Saat ini, bank yang khusus menangani pembiayaan kredit ini memiliki komposisi pemegang saham BTN sebesar 60,14% milik pemerintah, dan sebanyak 25,45% milik badan usaha asing. Sedangkan sisanya milik perseorangan, karyawan dan lainnya. Sempat beredar kabar, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia berminat untuk mengakuisisi saham BTN. (sf) foto: iwan armanias/parle/hr.

Pelaku Pelecehan di JIS Pantas Dituntut Pasal Berlapis

Dewan menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kasus pelecehan seksual yang menimpa siswa Taman Kanak-Kanak, Jakarta International School (JIS) di Jakarta Selatan. Para pelaku yang sudah ditahan aparat kepolisian pantas dituntut dengan pasal berlapis, untuk menunjukkan perilakunya sungguh tidak patut.

“Sanksi maksimal dalam UU Perlindungan Anak adalah 15 tahun, tapi pelaku bisa didakwa dengan pasal berlapis dalam UU lain diantaranya KUHP sehingga hukumannya bisa lebih berat. Kita berharap hakim memiliki kepekaan terhadap kasus ini,” kata anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari saat dihubungi di Jakarta, Rabu (16/4/14).

Ia juga meminta pihak kepolisian memperhatikan *criminal statistic* yang melibatkan para tersangka. Dalam kasus pelecehan seksual bukan tidak mungkin pelaku sudah pernah jadi pe-



Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari.

sakitan sebelumnya, sehingga apabila mengulangi kembali sanksi hukumannya jelas harus lebih berat.

“Polisi perlu punya *criminal statistic* bagi para pelaku kekerasan seksual, perlu didata jangan sampai melakukan kejahatan ini lagi. Kalau masih melakukan hukumannya diperberat,” papar politisi Fraksi PDIP ini. Disamping pelaku ia juga meminta aparat ke-

polisian menjerat manajemen sekolah termasuk guru yang diduga lalai dalam memberikan perlindungan.

Pada bagian lain Eva juga meminta segenap pihak agar memberikan perhatian terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual pada anak. Salah satu aspek yang patut dikaji adalah aturan perundang-undangan yang mempunyai efek jera.

Sejumlah negara menghukum berat pelaku pelecehan anak. Cina menetapkan hukuman seumur hidup bagi pelaku pelecehan pada satu anak, apabila lebih dari satu anak sanksinya lebih tegas, mati. Belgia menerapkan hukuman maksimal 30 tahun penjara apabila korban dibawah usia 10 tahun, sedangkan di AS kejahatan seksual pertama diganjar 25 tahun penjara apabila mengulangi sanksinya penjara seumur hidup. (iky) foto: iwan armanias/parle/hr.

Negara Bertanggungjawab Penuhi Bahan Pangan



Pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dan kebutuhan pangan umumnya, yang dibutuhkan rakyat, merupakan tanggung jawab negara. Sesuai konstitusi, pemerintah dituntut memegang visi kedaulatan pangan, bukan sekadar ketahanan pangan.

"Soal sembako, itu sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Lebih dari itu, bangsa Indonesia sudah seharusnya kedaulatan pangan merupakan prasyarat utama mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bersatu, maju, mandiri, adil dan sejahtera," ujar anggota Fraksi Golkar Firman Soebagyo di DPR, belum lama ini.

Masalah pangan akan menjadi ancaman persatuan bangsa ini, sebab ketika rakyat menjadi kekurangan pangan bisa terjadi perebutan sumber-sumber pangan. Di situlah terjadi pertikaian, yang kemudian menjurus kepada perpecahan bangsa.

"Oleh karena itu, sudah selayaknya, sumber-sumber pangan yang ada terus ditingkatkan mengingat jumlah manusia Indonesia kian bertambah

pesat," ujarnya.

Oleh karena perlu adanya prasyarat kedaulatan pangan. Itu antara lain berupa strategi peningkatan produktivitas, strategi perluasan areal, pengamanan hasil produksi, serta strategi penguatan kelembagaan dan pembiayaan.

"Selain itu, perlu perbaikan sistem produksi pangan nasional serta penggunaan insentif dan dis-insentif untuk mengurangi impor pangan," tegasnya.

Peran Bulog

Kebijakan insentif (dorongan/dukungan) dan disinsentif (bukan dukungan) dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, memberlakukan bea masuk tinggi terhadap impor produk pertanian.

"Jepang melakukan hal ini terhadap beras hingga mencapai 800 persen, dan tak dianggap melanggar aturan organisasi perdagangan dunia," ungkapnya.

Kedua, mendorong peran Bulog sebagai penyangga harga beras, jagung,

dan kedelai untuk memberikan stimulus kepada petani agar mau menanam karena ada jaminan stabilitas harga dan pasar.

Ketiga, mendorong kebijakan pertanian untuk memberikan insentif kepada petani, menjaga ketersediaan lahan dan keterjangkauan harga pupuk. "Selama ini, pemerintah hanya bertindak seperti pemadam kebakaran ketika terjadi krisis komoditas pangan. Padahal, seharusnya sumber permasalahannya yang harus dipadatkan," ujar Firman.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo.

Terkait pemberian insentif bagi petani, Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah segera mengimplementasikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Sedangkan untuk menyediakan lahan petani, pemerintah perlu membuka lahan pertanian sekaligus memperkuat infrastrukturnya. Sebab, menurut Firman, salah satu penyebab gangguan produksi pangan nasional adalah tidak memadainya infrastruktur pertanian, termasuk terjadinya penurunan kualitas infrastruktur pertanian yang ada. (as) foto: iwan armanias, doc/parle/hr.

UU Perlindungan Anak Perlu Direvisi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aziz Suseno menyesalkan kembali terjadinya pelecehan seksual terhadap siswa JIS yang dilakukan oleh orang dewasa di sekolah. Perlu adanya tindakan tegas dari pihak berwenang dalam penanganan kasus ini. Sebagai anggota legislatif ia akan terus mendorong komisinya untuk merevisi UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Saya tentu sangat menyesal terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Apalagi di lakukan di lingkungan sekolah yang seharusnya bisa memberi keamanan dan kenyamanan pada siswa. Terhadap kasus ini perlu adanya tindakan tegas dari aparat, dan saya melihat KPAI sudah bergerak mengawal kasus ini,” papar politisi dari Fraksi PKS ini kepada Parle, Kamis (17/4).

Dilanjutkannya, sebagai anggota DPR, ia dan teman-teman Komisi VIII akan mengevaluasi dan merevisi UU Perlindungan anak, jika memang pasal-pasal dalam UU tersebut dinilai belum bisa melindungi anak Indonesia secara keseluruhan.

Meski demikian, Aziz berharap KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sebagai mitra kerjanya tidak hanya memberi perhatian yang besar terhadap kasus tertentu saja yang kebetulan terekspose media. Ia meyakini, kasus seperti ini tidak hanya terjadi di kota besar saja, melainkan juga di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil, hanya saja



Anggota Komisi VIII DPR Aziz Suseno.

belum terungkap.

Oleh karena itu ia mendorong agar Institusi Negara yang menaungi perlindungan terhadap anak Indonesia bisa meningkatkan kinerjanya dengan memberikan perlindungan anak Indonesia, serta mengungkap kasus-kasus serupa di seluruh wilayah Indonesia. (Ayu) foto: andri/parle/hr.

DPR Minta Pemerintah Tolak Usulan Ekspor Log



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

DPR RI meminta pemerintah untuk menolak usulan ekspor kayu gelondongan atau log yang terus didorong oleh kelompok bisnis tertentu agar kran ekspor komoditas kehutanan tersebut dibuka.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo di Jakarta, Senin (14/4) menyatakan, jika pemerintah melemah dan berkompromi untuk membuka ekspor log, hal itu menjadi langkah inkonsistensi di sektor kehutanan.

Menurut dia, sejumlah dampak buruk seperti melemahnya daya saing industri kayu dalam negeri di era perdagangan bebas serta semakin

suburnya kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) akan menjadi catatan hitam di era terakhir pemerintahan SBY.

"Mafia kehutanan di Indonesia sangat luar biasa. Kita harus waspada. Jangan sampai hutan kita terus terdegradasi karena ambisi kelompok tertentu," katanya.

Menurut Firman, se usai reses Komisi IV akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk fokus membenahi tata kelola kehutanan yang lebih baik daripada terus menerus mewacanakan ekspor log yang bisa mematikan industri kayu dalam negeri. (As) foto: iwan armanias/parle/hr.



Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti menerima delegasi Setjen Wolesi Jirga National Assembly Afghanistan.

Setjen Parlemen Afghanistan Belajar dari Setjen DPR RI

Parlemen Afganistan ingin belajar dari kesuksesan Setjen DPR RI dalam mendukung kerja anggota dewan. Hal tersebut terungkap saat Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti menerima delegasi Setjen Wolesi Jirga National Assembly Afghanistan, Rabu (16/4) di gedung DPR RI, Senayan Jakarta.

“Sebenarnya Indonesia dan Afghanistan memiliki beberapa persamaan, salah satunya adalah mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Indonesia dinilai juga berhasil menegakkan demokrasi terbukti dengan pemilu yang lancar dan aman pasca reformasi. Di Afghanistan sendiri meski selama 35 tahun konflik internal terus terjadi, namun syukurlah beberapa waktu yang

lalu Afghanistan telah mampu menyelenggarakan pemilu meski tanpa adanya penjagaan keamanan dari tentara asing yang sudah meninggalkan negeri itu sebelumnya. Hal ini membuktikan proses demokrasi di Afghanistan bisa berjalan dengan aman dan lancar, dan partisipasi masyarakat juga luar biasa. Kami sangat mengapresiasi hal itu,” jelas Win, begitu Sekjen DPR RI biasa disapa.

Melihat kenyataan yang sangat kondusif tersebut, dilanjutkan Win, Setjen Parlemen Afghanistan yang baru saja terbentuk itu ingin belajar banyak dari Setjen DPR RI. Bagaimanapun juga rakyat perlu didorong motivasinya, salah satunya harus dari parlemen.

Karena diungkapkan Win, kebijakan-kebijakan keluar dari parlemen.

“Dengan kata lain mereka ingin staf parlemen Afghanistan memiliki kompetensi untuk mendukung parlemennya. Agar bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang segera bisa mensejahterakan rakyat Afghanistan,” ungkap Win.

Bahkan ditambahkan Win, pada 2012 lalu, Staf Kesenjangan Parlemen Afghanistan juga pernah beberapa kali berkunjung ke DPR RI guna mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dukungan terhadap kinerja anggota dewan. (Ayu)/foto:andri/parle/hr.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti menerima delegasi Sekretariat Wolesi Jirga Afghanistan di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Rabu (16/4) Foto: Andri/Parle/Hr.



Kabag Humas dan Kabag Pemberitaan Setjen DPR RI menerima kunjungan delegasi Sekretariat Dewan DPRD Sulawesi Selatan, Rabu (16/4). Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr.



Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI ke XXVIII, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (17/4). Foto: Iwan Armanias/Parle.